



Upaya Penguatan Tata Kelola Desa Adat Yang Efektif Dan Berkelanjutan Untuk Menjaga Keajegan Alam, Manusia, Dan Budaya Bali

I Made Endra Lesmana Putra¹, Ni Made Wisni Arie Pramuki², Putu Atim Purwaningrat³, Gde Indra Surya Diputra⁴, Komang Indra Apsaridewi⁵, Made Gede Arthadana⁶
^{1,2,3,4,5,6}Universitas Hindu Indonesia
e-mail: wisniariepramuki@unhi.ac.id

Received: 5 April 2026, Revised: 25 April 2026, Accepted: 30 May 2026

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v5i2.1813>

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola Desa Adat di Provinsi Bali, yang memiliki peran sentral dalam menjaga tradisi, adat, serta keberlanjutan Alam, Manusia, dan Budaya Bali. Latar belakang kegiatan ini adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bendesa Adat guna menjamin perencanaan pembangunan yang efektif, transparan, dan berbasis prinsip *good governance*. Urgensi ini ditekankan dalam konteks implementasi kebijakan baru, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. Program sosialisasi ini diwujudkan melalui Webinar Widya Sancaya #4 yang dilaksanakan secara daring pada 30 Juli 2025, diselenggarakan oleh Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia, dengan sasaran utama Seluruh Bendesa Adat di wilayah Provinsi Bali. Metode yang digunakan adalah pemaparan komprehensif oleh narasumber ahli mengenai isu hubungan Majelis Desa Adat (MDA) dan Desa Adat sebagai entitas otonom, serta tata kelola pasca regulasi baru. Kegiatan ini berhasil berjalan lancar dan sesuai target, mencapai tujuannya dalam memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Respon positif dari Bendesa Adat menunjukkan apresiasi dan harapan agar program serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasil akhir yang diharapkan adalah tersusunnya langkah-langkah strategi yang dapat memperkuat implementasi peraturan/kebijakan, demi menjaga Bali agar tetap Ajeg.

Kata kunci: desa adat, tata Kelola desa adat, kompetensi SDM

Abstract

This community service activity (Pengabdian kepada Masyarakat, PkM) was carried out as an effort to strengthen the governance of Desa Adat (Traditional Villages) in Bali Province, which possess a central role in maintaining tradition, custom, and the sustainability of Balinese Nature, People, and Culture. The background of this activity is the urgent need to enhance the competency of the Human Resources (SDM) of the Bendesa Adat to ensure development planning is effective, transparent, and based on good governance principles. This urgency is emphasized in the context of implementing new policies, namely Regional Regulation (Perda) Number 4 of 2019 and Law (UU) Number 15 of 2023. This socialization program was realized through the Widya Sancaya #4 Webinar, held online on July 30, 2025. It was organized by the Center for Traditional Village Studies (Pusat Kajian Desa Adat) at Universitas Hindu Indonesia, targeting all Bendesa Adat in Bali Province. The method utilized involved comprehensive presentations by expert speakers regarding the issues surrounding the relationship between the Traditional Village Council (Majelis Desa Adat, MDA) and the Desa Adat as autonomous entities, as well as governance post-new regulations. The activity was successfully conducted smoothly and met its targets, achieving its goal of providing in-depth information, knowledge, and understanding to the participants. The positive response from the Bendesa Adat indicated appreciation and hope that similar programs could be carried out continuously. The expected outcome is the formulation of strategic steps that can strengthen the implementation of regulations/policies, for the purpose of maintaining Bali's sustainability (Ajeg).

Keywords: Traditional Village, Governance of Traditional Villages, Competency of Human Resources



1. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa Adat di wilayah Provinsi Bali memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tradisi, adat, dan budaya Bali, yang merupakan tiga unsur vital dalam melestarikan Bali, yaitu Alam Bali, Manusia (Krama) Bali, dan Budaya. Untuk memastikan bahwa pembangunan desa adat dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan, penguatan model tata kelola desa adat menjadi faktor penentu utama. Desa adat yang di dalamnya terdapat seluruh elemen lapisan masyarakat sudah seharusnya mendukung tata kelola yang berkualitas (Jenita et al., 2022; Karim et al., 2023; Putra et al., 2024). Tata kelola yang baik, termasuk tata kelola pemerintahan dan keuangan, membantu perangkat atau pengurus desa adat bekerja dengan perencanaan, pembagian tugas, dan sistem kerja yang jelas, sehingga berdampak pada pelayanan publik di tingkat desa menjadi lebih baik dan cepat. Perencanaan pembangunan yang berbasis data, kebutuhan masyarakat, dan potensi lokal hanya dapat tercapai jika desa menerapkan tata kelola yang baik dan berbasis prinsip *good governance*. Oleh karena itu, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah desa adat sudah seharusnya ditingkatkan untuk membantu manajemen tata kelola di wilayah tersebut (Herispon et al., 2022; Karim et al., 2023; Suriani et al., 2023).

Kebutuhan akan peningkatan tata kelola dan kompetensi SDM ini sangat relevan mengingat adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019, yang merupakan regulasi penting dalam penentuan arah keberadaan desa adat di Bali. Menjadi kesadaran bersama akan pentingnya kehadiran pemerintah provinsi bersama perguruan tinggi untuk dapat membantu menentukan langkah serta arah kebijakan dan program desa adat. Dalam rangka mendukung pencapaian hasil pengembangan dan pelatihan SDM Bendesa Adat di Bali, Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia (UNHI), bekerja sama dengan LPPM dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, melaksanakan program Sosialisasi dan Pendampingan SDM secara daring melalui Webinar Widya Sancaya .

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan, serta pemahaman kepada seluruh Bendesa Adat di wilayah Provinsi Bali, terkait Penguatan Pemahaman dan Tata Kelola Desa Adat di Bali: Tantangan, Kesadaran, dan Arah Implementasi Perda 4/2019 dan UU 15/2023. Webinar ini menghadirkan narasumber yang memaparkan materi krusial, seperti isu-isu seputar hubungan Majelis Desa Adat (MDA) dan Desa Adat sebagai entitas yang otonom, serta Tata Kelola Desa Adat pasca Perda 4/2019 dan UU No. 15 Tahun 2023. Diharapkan, kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi serta dapat menyusun langkah-langkah strategi yang memperkuat pemahaman dan implementasi peraturan untuk menjaga Bali kedepannya, mulai dari Alam, Manusia, dan Budaya Bali agar tetap bisa *Ajeg*.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dilaksanakan sebagai Program Sosialisasi yang berbentuk Webinar (seminar daring). Kegiatan ini secara spesifik dinamakan Widya Sancaya #4 dan diselenggarakan oleh Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia. Program ini dibuat sebagai upaya untuk mendukung pencapaian hasil pengembangan dan pelatihan SDM Bendesa Adat di Bali.

Waktu, Tempat, dan Pelaksana

Kegiatan Widya Sancaya #4 ini dilaksanakan secara daring (online) pada tanggal 30 Juli 2025. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan waktu selama 2 jam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia (UNHI) dan merupakan hasil kolaborasi dengan LPPM Universitas Hindu Indonesia serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali.

Sasaran dan Peserta

Sasaran utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah Seluruh Bendesa Adat di wilayah Provinsi



Bali. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini (online) meliputi Bendesa Adat di Provinsi Bali, serta beberapa pihak internal institusi, yaitu Rektor Universitas Hindu Indonesia, Kepala LPPM Universitas Hindu Indonesia, Tim Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia, dan Bapak/Ibu Dosen di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia.

Teknik Pelaksanaan dan Materi

Kegiatan webinar ini dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Rektor I Universitas Hindu Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan *keynote speech* oleh Bapak Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) Provinsi Bali. Kegiatan berlangsung interaktif dan dipandu oleh moderator yang berasal dari Dosen/Akademisi Program Studi Hukum Adat Universitas Hindu Indonesia.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber ahli:

1. Narasumber pertama adalah Bapak Dr. I Ketut Sudantra, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Anggota Sabha Nayaka MDA Provinsi Bali. Beliau memaparkan materi tentang “isu-isu di sekitar hubungan MDA dan Desa adat sebagai entitas yang otonom”.
2. Narasumber kedua adalah Bapak Drs I Ketut Sumarta, seorang Praktisi adat dan Pengurus Majelis Desa Adat periode 2019–2024. Beliau memaparkan tentang Tata Kelola Desa Adat di Bali pasca Perda 4 Tahun 2019 dan UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Secara keseluruhan, materi yang disampaikan bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, serta pemahaman terkait Penguatan Pemahaman dan Tata Kelola Desa Adat di Bali: Tantangan, Kesadaran, dan Arah Implementasi Perda 4/2019 dan UU 15/2023

3. AKTIFITAS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diwujudkan melalui pelaksanaan Webinar Widya Sancaya #4 yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 30 Juli 2025, sebagai hasil kolaborasi antara Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia, LPPM, dan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Forum ini menjadi sarana strategis untuk menyebarluaskan pengetahuan mengenai regulasi terbaru, yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023, yang disampaikan langsung oleh praktisi adat dan anggota Sabha Nayaka MDA Provinsi Bali.

Nilai tambah utama dari aktivitas ini adalah peningkatan kapasitas institusi desa adat melalui pemahaman mendalam mengenai hubungan entitas otonom antara Majelis Desa Adat (MDA) dan Desa Adat, serta manajemen tata kelola pemerintahan desa pasca pemberlakuan regulasi baru. Bagi para peserta, khususnya Bendesa Adat, kegiatan ini memberikan perubahan positif berupa peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis prinsip *good governance*.

Secara jangka panjang, aktivitas ini berkontribusi pada terciptanya langkah-langkah strategis dalam implementasi kebijakan desa adat yang lebih kuat. Hal ini diharapkan mampu membawa perubahan perilaku sosial dan kebijakan di tingkat desa untuk menjaga keberlanjutan (keajaiban) tiga unsur vital Bali, yaitu Alam, Manusia, dan Budaya Bali di tengah tantangan zaman.

4. IMPLIKASI

Pelaksanaan program Sosialisasi dan Pendampingan Sumber Daya Manusia, yang diwujudkan melalui Webinar Widya Sancaya #4, secara umum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target serta sasaran kegiatan. Meskipun persiapan telah dilakukan sebaik-baiknya, hanya ditemukan sedikit kendala jaringan pada saat kegiatan webinar berlangsung. Kendati demikian, tidak ditemukan kendala atau permasalahan lain yang signifikan sepanjang pelaksanaan program. Kegiatan ini secara spesifik bertujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman yang mendalam mengenai Penguatan Pemahaman dan Tata Kelola Desa Adat di Bali, termasuk tantangan, kesadaran, dan arah implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) 4/2019



dan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Sebagai wadah, kegiatan Widya Sancaya yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Desa Adat Universitas Hindu Indonesia ini berhasil memberikan ruang dan waktu bagi seluruh pengurus desa adat untuk bertukar informasi dan mendapatkan pemahaman terkait keberadaan desa adat saat ini, terutama mengenai peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Substansi materi yang disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan para Bendesa Adat. Narasumber pertama memaparkan isu-isu di sekitar hubungan Majelis Desa Adat (MDA) dan Desa Adat sebagai entitas yang otonom. Sementara itu, narasumber kedua memaparkan secara komprehensif tentang Tata Kelola Desa Adat di Bali pasca Perda 4 Tahun 2019 dan UU No. 15 Tahun 2023. Paparan materi ini mendapatkan respons yang positif dari para peserta webinar, khususnya dari Jro Bendesa Adat di wilayah Provinsi Bali, yang sangat mengapresiasi kegiatan Widya Sancaya ini. Apresiasi ini bahkan disertai dengan harapan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Sertifikat Peserta bagi seluruh partisipan.

Sebagai hasil dari kegiatan diskusi dan berbagi informasi ini, terdapat harapan yang kuat bahwa program tersebut dapat memfasilitasi tersusunnya langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat pemahaman dan implementasi peraturan atau kebijakan. Pada akhirnya, upaya penguatan pemahaman dan tata kelola ini ditujukan untuk menjaga Bali ke depannya, mulai dari Alam, Manusia, dan Budaya Bali agar tetap bisa *Ajeg*



(a)



(b)

Gambar 1 (a)(b) Dokumentasi Kegiatan

5. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa Program Sosialisasi dan Pendampingan Sumber Daya Manusia (Webinar Widya Sancaya #4) dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target kegiatan. Meskipun terdapat sedikit kendala jaringan, pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan permasalahan signifikan lainnya.

Kegiatan ini telah berhasil menjalankan tujuannya sebagai upaya untuk memberikan informasi, pengetahuan, serta pemahaman yang dibutuhkan oleh Seluruh Bendesa Adat di wilayah Provinsi Bali terkait Penguatan Pemahaman dan Tata Kelola Desa Adat di Bali. Pemahaman ini secara spesifik mencakup Tantangan, Kesadaran, dan Arah Implementasi Perda 4 Tahun 2019 dan UU Nomor 15 Tahun 2023.

Harapannya, melalui kegiatan ini yang menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi, dapat tersusun langkah-langkah strategi yang dapat memperkuat pemahaman dan implementasi peraturan atau kebijakan. Pada akhirnya, upaya penguatan tata kelola ini merupakan kontribusi untuk menjaga Bali ke depannya, mulai dari Alam, Manusia, dan Budaya Bali agar tetap bisa *Ajeg*.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hindu Indonesia yang telah memberi dukungan **financial** terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Herispon, H., Dzikra, F. M., Mardan, J. A., Anuar, S., & Herman, H. (2022). Pengenalan Tata Kelola Keuangan Rumah Tangga Pada Warga Desa Talang Sungai Limau, Indragiri Hulu, Riau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i4.328>
- Jenita, Andriani, R., Hamdalah, & Hertina. (2022). Sosialisasi Prosedur Konversi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Sistem Syariah Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i1.81>
- Karim, K., Zasriati, M., & Iskanto, D. (2023). Pelatihan Pemanfaatan Pengembangan Tanaman Organik Penunjang Ekonomi Keluarga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i1.517>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali. Nomor 4 Tahun 2019. (Mengenai Desa Adat)
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 15 Tahun 2023. *Tentang Provinsi Bal*
- Putra, I. M. E. L., Pramuki, N. M. W. A., Purwaningrat, P. A., Diputra, G. I. S., Apsaridewi, K. I., & Arthadana, M. G. (2024). Harmoni Alam Dan Budaya: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Tri Hita Karana Di Desa Adat Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), 167-173. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1156>
- Putra, I. M. E. L., Pramuki, N. M. W. A., Purwaningrat, P. A., Diputra, G. I. S., Apsaridewi, K. I., & Arthadana, M. G. (2024). Harmoni Alam Dan Budaya: Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Tri Hita Karana Di Desa Adat Bali. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1156>
- Suriani, N. N., Yogiarta, I. M., & Jayanti, L. E. (2023). Penguatan Manajemen Usaha Dan Pemasaran Usaha Bumbu Rajang Di Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i4.765>